



PROFIL

PEMANTAUAN
DAN EVALUASI TINGKAT
PENERAPAN NSPK
PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI

SUBSTANSI KONTRAK KONSTRUKSI

KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2020 terhadap Sampling Paket Pekerjaan Konstruksi pada **Satuan Kerja masing-masing Direktorat Jenderal Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan terpilih** maka disusunlah **Profil Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** ini.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2020 dilaksanakan sebagai metode pengukuran kinerja pelaksanaan Kontrak Konstruksi dengan mengacu kepada **Permen PU No. 14/PRT/M/2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia**. Selain dari regulasi tersebut, beberapa kondisi kinerja pelaksanaan kontrak juga mengacu pada *best practice* di lapangan.

Indikator Kunci Pengukuran Tertib Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi yang dilakukan adalah berdasarkan **Kelengkapan Dokumen Administrasi Kontrak** terhadap Permen PUPR **No. 14/PRT/M/2020**.

Semoga **Profil Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** yang telah tersusun ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan/penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap Sistem Pembinaan Bidang Kontrak Konstruksi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Jakarta, Desember 2020

Disusun Oleh

Tim Penyusun Pemantauan dan Evaluasi Subdit Konstrak Konstruksi
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Aplikasi SPIM

Penentuan Target Satker

Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menyelenggarakan fungsi diantaranya selain penyusunan NSPK di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ditjen Bina Konstruksi juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi dalam terminologi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui:

- a. Penetapan Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. Pengembangan kerja sama dalam Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan jasa konstruksi; dan
- e. Dukungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Amanat dari undang-undang tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Mengacu kepada Pasal 212 pada undang-undang tersebut mengatur bahwa, "Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi."

Selain itu, dalam Pasal 123 ayat (1), diatur juga secara lebih detail terkait substansi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu "Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi kegiatan pengawasan terhadap:

- a. pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan kontrak kerja Konstruksi."

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat visi-misi kementerian untuk tahun anggaran 2020-2024, dimana pada misi poin keempat menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 - 2024 juga dijelaskan bahwa arah strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk melaksanakan 2 program, pertama, program dukungan manajemen dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR, dan kedua, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang Konstruksi yang kompeten dan Profesional.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi melaksanakan turunan dari Sasaran Program Ditjen Bina Konstruksi yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, dengan Indikator Kinerja Program yaitu **Tingkat Kualitas Sumber Daya Konstruksi**, dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Kegiatan **Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan sasaran kegiatan **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**.

Indikator dari **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** sebagaimana yang dimaksud di atas yaitu tingkat penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan target pada tahun 2020 sebesar 60%.

Salah satu tujuan dari penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi adalah untuk mewujudkan penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi dalam hal ini pada proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi dengan menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen kontrak konstruksi dan mengikat kedua belah pihak.

Kontrak Konstruksi tersebut juga harus dapat menjamin bahwa pekerjaan konstruksi/konsultansi yang dilakukan menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil akhir, dilakukan dengan memenuhi segala standar atau regulasi acuan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi di mulai dari tahapan pra-konstruksi sampai dengan tahapan penyelesaian proyek, untuk menghasilkan produk konstruksi yang dapat handal sampai dengan usia layannya terpenuhi. 2 (dua) aspek pengadaan jasa konstruksi dan kontrak konstruksi akan menjadi penilaian atas kesuaian dan pemenuhan segala standar atau regulasi acuan di mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian kontrak.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2020 dilaksanakan sebagai metode pengukuran kinerja pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dan Kontrak Konstruksi dengan mengacu kepada **Permen PU No. 14/PRT/M/2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia**.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya terkait penerapan NSPK Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia di Satuan Kerja lingkungan Kementerian PUPR. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik untuk mendukung rencana strategis Kementerian PUR terkait peningkatan tertib kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dan kontrak konstruksi sebesar 60% yang perlu dicapai di tahun 2020.

Dasar Hukum

1. UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024; dan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

Output **Profil Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat secara daring dan beberapa Provinsi.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dalam rangka mengukur tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan :

1. Persiapan Kegiatan
 - Dalam tahap awal, Sub-Direktorat/Direksi Teknis Kontrak Konstruksi akan membuat dan mengirimkan Surat pemberitahuan kegiatan Kepada Unit organisasi yang berisi informasi tentang rencana dan tanggal pelaksanaan monitoring dan pendampingan. Selain Surat Pemberitahuan Kegiatan, dilampirkan pula TOR kegiatan, buku petunjuk, daftar Satker, daftar paket pekerjaan, daftar dokumen bukti kerja yang dibutuhkan dan form data umum paket pekerjaan yang diusulkan;

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi kegiatan
- Melakukan pengisian dan verifikasi data umum paket pekerjaan yang diusulkan oleh Satker/PPK;
- Penjelasan Daftar SIMAK 2020 oleh tim konsultan melalui diskusi dan tanya jawab sekaligus memberikan pengarahan
- Pengisian Aplikasi Daftar Simak (Sistem Penilaian Mandiri-SPIM) dilakukan langsung oleh PPK melalui *googleform*;
- Satker/PPK melengkapi bukti kerja sesuai jawaban dalam Daftar Simak;
- Pemeriksaan dan verifikasi jawaban Daftar Simak dan keberadaan bukti kerja melalui google form.
- Penilaian atau skoring hasil review dan verifikasi jawaban dalam Daftar Simak dan kelengkapan bukti kerja.
- Penyusunan hasil penilaian dalam profil tertib penyelenggaraan kontrak konstruksi.

Pelaksana kegiatan melibatkan Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Subdit di lingkungan Dit.Pengembangan Jasa Konstruksi, dan tim Konsultan.

Aplikasi Google Form

Aplikasi Google form adalah aplikasi yang disediakan google untuk melakukan penyebaran kuisioner secara daring. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi SPIM:

- Satker mengisi Form Data Umum Paket Pekerjaan melalui google form dengan link yang sudah disediakan
- Data Umum Paket Pekerjaan yang menjadi sampel penilaian dan telah diinput/ didaftarkan akan diverifikasi dan disetujui (*approval*).
- Setiap *User* mengisi setiap pertanyaan dalam Daftar Simak yang disertai dengan foto Bukti Dokumen (sesuai permintaan dalam aplikasi). Setiap pertanyaan diberi keterangan (*hint*) yang disimbolkan pada aplikasi.
- Daftar Simak yang telah diisi secara lengkap, selanjutnya dapat diunggah (*upload*)
- Selanjutnya Daftar Simak yang telah diunggah (*upload*) akan dicek/ diverifikasi akhir. Proses verifikasi akhir dilakukan untuk memastikan setiap pertanyaan telah diisi dan telah dilengkapi dengan Foto Bukti Kerja/ Dokumen sesuai permintaan.

Penentuan Target Satker

Identifikasi awal satker target kegiatan monitoring dan pendampingan dilakukan oleh Tim SPIM. Kegiatan ini dilakukan dengan menetapkan kriteria pemilihan Satker secara terintegrasi yaitu:

- a) Keterwakilan per unit organisasi, per Wilayah Balai Jasa Konstruksi, dan per provinsi;
- b) Jenis Paket Pekerjaan Konstruksi;
- c) Nilai Pagu dan Jumlah Proyek Terbesar; minimal harga kontrak Rp. 1 Miliar;
- d) Menggunakan Permen 14/2020
- e) Sumber Danaberasal dari APBN/ SBSN.

Kegiatan pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2020 terhadap paket pekerjaan konstruksi di Satuan Kerja masing-masing Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

A. Focus Group Discussion (FG) Brainstorming Pemantauan dan Evaluasi Sistem Penyelenggaraan Konstruksi

Tempat dan Waktu: Bintaro, 19 Agustus 2020

Peserta: Jabatan Fungsional PJK Utama dan Internal Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Narasumber: DR. Putut Marhayudi; Indro Pantja Pramodo, ST., MT.; Kiki Patricia Dewi, ST.

B. Finalisasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Uji Coba Pelaksanaan Pengumpulan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tempat dan Waktu: Bintaro, 13 November 2020

Peserta: Jabatan Fungsional PJK Utama dan Internal Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Narasumber: DR. Putut Marhayudi; Indro Pantja Pramodo, ST., MT.; Kiki Patricia Dewi, ST.; Auliya Ar-Rahma, ST., MT.; Dicky Rahardiantoro, S.Si., M.Sc.

C. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Regional Barat

Tempat dan Waktu: Bintaro, 10 Desember 2020

Undangan: 226 paket pekerjaan

Hadir: 133 paket pekerjaan

Narasumber: Ellis Sumarna, SE., MM.; Kiki Patricia Dewi, ST.; Auliya Ar-Rahma, ST., MT.; Dicky Rahardiantoro, S.Si., M.Sc.

D. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Regional Timur

Tempat dan Waktu: Bintaro, 11 Desember 2020

Undangan: 96 paket pekerjaan

Hadir: 45 paket pekerjaan

Narasumber: Indro Pantja Pramodo, ST., MT.; Ellis Sumarna, SE., MM.; Kiki Patricia Dewi, ST.; Auliya Ar-Rahma, ST., MT.; Dicky Rahardiantoro, S.Si., M.Sc.

E. Analisa Data dan Verifikasi Teknis Hasil Pengukuran Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA. 2020

Tempat dan Waktu: Bogor, 18-19 Desember 2020

Peserta: Internal Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Narasumber: Indro Pantja Pramodo, ST., MT.; Kiki Patricia Dewi, ST.; Auliya Ar-Rahma, ST., MT.; Dicky Rahardiantoro, S.Si., M.Sc.

Indikator Pengukuran

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan target tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar **60 %**. Kegiatan ini terintegrasi mencakup dua bidang diantaranya Pengadaan Barang dan Jasa (**PBJ**) dan Kontrak Konstruksi (**KK**)

Hasil dari Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dituangkan dalam sebuah **Profil Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** yang dapat memberikan gambaran dan informasi bagaimana tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi di masing-masing bidang pada tingkat Satuan Kerja di Kementerian PUPR.

Indikator Utama :

Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Indikator Kunci:

- Pemenuhan persyaratan pada saat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pemilihan.
- Pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak;
Yaitu apakah Satker telah memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kontrak pada setiap tahapan kegiatan kontrak.
- Pemenuhan kesesuaian substansi administrasi kontrak;
Yaitu apakah Satker telah memenuhi kesesuaian substansi dokumen administrasi kontrak terhadap Permen PUPR No.14/2020, yang meliputi struktur dokumen dan isi materi dokumen.
- Pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak;
Yaitu apakah Satker telah melaksanakan kegiatan kontrak pada tahapan waktu yang sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No.14/2020.

Kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan hasil pengisian Daftar Simak yang terbagi atas:

- a) Kriteria Pengukuran Tertib : Apabila Dokumen atau kegiatan dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Permen PUPR
- b) Kriteria Pengukuran Kurang Tertib : Apabila Administrasi Kontrak dilaksanakan namun belum seluruhnya sesuai ketentuan Permen PUPR; atau dilaksanakan namun data/dokumen belum ada pada saat Monev; atau dilaksanakan namun mengacu pada peraturan lain.
- c) Kriteria Pengukuran Tidak Tertib : Apabila kegiatan dan administrasi kontraknya tidak dilaksanakan.

Penilaian atau skoring Satker dilakukan berdasarkan jawaban dalam Daftar Simak yang diunggah, yaitu "ada" atau "tidak", dan ketersediaan bukti kerja. Seluruh jawaban "ada" akan diberi nilai 1, dan jawaban "tidak" dengan nilai 0. Dalam kondisi khusus bila jawaban "tidak aplikatif" atau "tidak terjadi" maka jawaban tidak diperhitungkan dalam penilaian. Seluruh penilaian akan dijumlah secara total tiap tahap kegiatan kontrak, dan dikategorikan menjadi:

- a) Tertib: bila rentang nilai 60-100;
- b) Tidak Tertib: bila nilai di bawah 59.

Review Pengisian Daftar Simak

Instrumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibuat berupa Daftar Simak, dimana penyusunan Daftar Simak ini adalah berdasarkan dari daftar kebutuhan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pemilihan, dokumen administrasi kontrak pada Permen PUPR No. 14/2020, dan juga berdasarkan dokumen administrasi *best practice* pada kegiatan Monev TA. 2015, TA. 2016 dan TA. 2017 yang ditemukan di Satker target Monev.

Tabel Daftar Simak Umum Subdit Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2020

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
1. Apakah sudah tersedia Surat Keputusan (SK) sebagai berikut:	
a. SK Pengangkatan Satker (KPA)	
b. SK Pengangkatan PPK	
2. Apakah Dokumen Perencanaan Pengadaan Paket ini sudah terdiri dari tahapan:	
a. Identifikasi Kebutuhan	
b. Penetapan Jenis Jasa Konstruksi	
c. Jadwal Pengadaan	
d. Anggaran Pengadaan Jasa Konstruksi	
e. Penyusunan Spesifikasi Teknis	
f. Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB	
g. Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi	
h. Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi (apabila memenuhi kriteria konsolidasi)	
i. Penyusunan Biaya Pendukung	
3. Apakah identifikasi kebutuhan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sudah berdasarkan Rencana Kerja (Dokumen	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
RPJM)?	
4. Apakah penetapan jenis jasa konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Paket ini sudah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:	
a. Identifikasi Kebutuhan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Jenis Jasa Konstruksi	
b. penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai;	
c. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi	
d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha kecil;	
e. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana	
f. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri	
g. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan	
h. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain	
i. dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia;	
j. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai	
k. Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak	
l. Kepastian Pembebasan Lahan	
5. Apakah dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sudah memuat Jadwal Pengadaan yang terdiri dari :	
a. Rencana Jadwal Persiapan Pengadaan	
b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan (Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan)	
6. Apakah Anggaran Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan paket ini terdiri atas:	
a. biaya Jasa Konstruksi (meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi teknis/KAK)	
b. biaya pendukung (meliputi biaya pelatihan, biaya instalasi atau testing, biaya administrasi dan/atau biaya lainnya)	
7. Apakah Penyusunan Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan meliputi:	
a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan	
c. spesifikasi proses/kegiatan	
d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/ metode kerja	
e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi	
8. Apakah Penyusunan Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan paket ini disusun dengan ketentuan:	
a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan	
b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri	
c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia	
d. metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan	
e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan	
f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan	
g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan	
h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk	
i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan	
j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran	
k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi	
9. Apakah Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan paket ini telah dilakukan dengan berorientasi pada hal-hal berikut:	
a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan	
b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi	
c. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan	
d. ketersediaan anggaran	
10. Apakah Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sudah memperhatikan larangan-larangan berikut:	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah	
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai	
c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau	
d. memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.	
11. Apakah Dokumen Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PPK?	
12. Apakah pengumuman RUP sudah memenuhi ketentuan:	
a. penyusunan RUP dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya	
b. dilakukan melalui aplikasi sistem informasi Rencana Umum Pengadaan	
c. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran	
13. Apakah Persiapan Pengadaan paket ini telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:	
a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis	
b. penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi	
c. penyusunan dan penetapan HPS	
d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak	
e. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga	
14. Apakah Spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK sebelumnya telah dilakukan proses Reviu berdasarkan data/informasi terkini?	
15. Apakah penyusunan HPS telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
a. Disusun berdasarkan hasil perkiraan biaya/RAB pada tahap perencanaan pengadaan, pagu anggaran yang tercantum dalam rencana kerja dan hasil reviu RAB	
d. dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
dipertanggungjawabkan	
e. berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer's estimate) berdasarkan detailed engineering design.	
f. Nilai total HPS bersifat terbuka, tidak bersifat rahasia dan paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran	
g. Untuk paket pekerjaan Konstruksi > RP.100 Miliar dan jasa Konsultansi > Rp.10 Miliar telah mendapatkan rewiu RAB dan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	
h. HPS ditetapkan PPK paling lama 28 hari kerja sebelum penyampaian dokumen penawaran (Pasakualifikasi) atau penyampaian dokumen kualifikasi (Prakualifikasi)	
16.Apakah dalam penyusunan HPS telah memperhitungkan Biaya Penerapan SMK pada Daftar Kuantitas dan Harga?	
17.Apakah penyusunan Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian dan SSKK) sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sudah diisi dengan karakteristik pekerjaan	
18.Apakah Pokja Pemilihan melakukan tahap persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:	
a. rewiu dokumen persiapan pengadaan	
b. penetapan metode pemilihan Penyedia	
c. penetapan metode kualifikasi	
d. penetapan persyaratan Penyedia	
e. penetapan metode evaluasi penawaran	
f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran	
g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan	
h. penyusunan Dokumen Pemilihan	
i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding	
19.Apakah Pokja Pemilihan bersama PPK melakukan Rewiu dokumen persiapan pengadaan meliputi:	
a. spesifikasi teknis dan detailed engineering design	
b. HPS	
c. rancangan Kontrak	
d. dokumen anggaran belanja	
e. ID paket RUP	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
f. waktu penggunaan barang/jasa	
g. analisis pasar	
h. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi	
20. Apakah penyusunan jadwal pengadaan meliputi:	
a. Pengumuman tender dilakukan paling singkat 5 hari kerja	
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran	
c. Pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman tender	
d. Penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan	
e. Pembukaan dokumen Penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir	
f. Masa sanggah terhitung 5 hari kerja setelah Pengumuman Pemenang	
g. Masa sanggah banding terhitung 5 hari kerja setelah jawaban sanggah	
h. Masa sanggah banding terhitung 5 hari kerja setelah jawaban sanggah	
21. Apakah Dokumen Pemilihan terdiri dari:	
a. Umum	
b. Pengumuman	
c. Instruksi Kepada Peserta	
d. Lembar Data Pemilihan	
e. Lembar Data Kualifikasi	
f. Bentuk Dokumen Penawaran	
g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi	
h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi	
i. Rancangan Kontrak	
j. Spesifikasi Teknis dan Gambar	
k. Daftar Kuantitas dan Harga/Keluaran dan Harga	
l. Dokumen-Dokumen Lain	
m. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga	
n. Ketentuan Lain-Lain	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
22. Apakah persyaratan Peralatan Utama mencantumkan jenis, kapasitas dan jumlah yang jelas, serta kepemilikan berupa sewa/sewa beli/milik sendiri?	
23. Apakah persyaratan Personel Manajerial memenuhi ketentuan:	
a. mensyaratkan pengalaman minimal tanpa persyaratan pendidikan	
a. mensyaratkan SKTK (untuk paket Kualifikasi Usaha Kecil)	
b. mensyaratkan SKA (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	
24. Apakah Isi Dokumen Pemilihan sudah memuat persyaratan RKK yang meliputi:	
a. Uraian Pekerjaan	
b. Identifikasi Bahaya K3	
25. Apakah dalam mempersyaratkan personel manajerial K3 mengikuti ketentuan:	
a. Ahli K3 Konstruksi/ Petugas Keselamatan Konstruksi bagi segmentasi usaha kecil	
b. Ahli K3 Konstruksi bagi segmentasi usaha menengah dan besar	
26. Apakah terdapat pekerjaan yang wajib disubkontrakan kepada Penyedia Jasa Spesialis dan Penyedia Jasa Kecil untuk paket dengan nilai > RP.25 Miliar	
27. Apakah mensyaratkan SBU dengan ketentuan:	
a. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU	
b. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.	
28. Apakah mensyaratkan sertifikat lain untuk pekerjaan yang diperuntukan untuk Usaha Kecil dan Menengah? (seperti ISO 9001, Sertifikat K3, dll)	
29. Apakah setelah Penetapan Pemenang, Pokja Pemilihan menyampaikan BAHP kepada PPK yang terdiri dari :	

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	Ket.
Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan	
Nama seluruh peserta	
Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta	
Metode evaluasi yang digunakan	
Kriteria dan Unsur yang dievaluasi	
Rumus yang dipergunakan	
Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi	
Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan (Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi, Harga Timpang, Evaluasi Kewajaran Harga dan Klarifikasi)	
Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan	
Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada)	
Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).	
30. Apakah ada tanggapan terkait persyaratan tender yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020?	

Daftar Kebutuhan Dokumen Administrasi terbagi atas :

Tabel Daftar Simak Umum Subdit Kontrak Konstruksi 2020

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
Siapa penyedia jasa pengawasan konstruksi pada paket pekerjaan ini ?	
Konsultan Pengawas	
Konsultan Manajemen Konstruksi	
Other :	
Persentase Progres Fisik Rencana & Realisasi :	
Apakah terjadi Adendum?* dan Berapa kali?	

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
Hal apakah yang menyebabkan Adendum terjadi pada paket pekerjaan ini? :	
Perubahan Pekerjaan	
Perubahan Harga Kontrak	
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	
Perubahan Personil Manejerial dan/atau Peralatan Utama	
Perubahan Administrasi	
Apakah terjadi Keadaan Kahar?	
Apakah penghentian pekerjaan dilakukan untuk: *	
Penghentian Sebagian, apabila keadaan kahar pada bagian pekerjaan	
Penghentian Seluruhnya, apabila keadaan kahar berdampak terhadap keseluruhan pekerjaan	
Apakah penghentian kontrak dilakukan untuk: *	
Penghentian Sementara hingga keadaan kahar berakhir	
Penghentian Permanent apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan diselesaikan pekerjaan	
Apakah terjadi peristiwa Kompensasi?	
Apa bentuk kompensasi yang diberikan kepada penyedia ?	
Ganti rugi	
Perpanjangan waktu	
Ganti rugi dan perpanjangan waktu	
Apakah terjadi Kontrak Kritis?	
Apakah terjadi Pemutusan Kontrak?	
Apakah terjadi penyesuaian harga pada paket pekerjaan ini ? (untuk paket tahun Jamak atau MYC masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan)	
Apakah terjadi Sengketa Kontrak/perselisihan pada paket pekerjaan ini?	
Apakah para pihak sudah menyelesaikan sengketa/perselisihan dengan cara musyawarah ?	
Bagaimanakah cara para pihak dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi?	
Kendala/permasalahan pada paket pekerjaan ini yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak antara lain : *	
Cuaca ekstrim	
Gangguan keamanan	

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
Prosedur perizinan yang sulit	
Pembebasan lahan	
INDIKATOR KUNCI I : KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI KONTRAK	
Apakah dokumen administrasi Keadaan Kahar telah dilengkapi dengan : *	
Surat pemberitahuan keadaan Kahar dari Penyedia	Ada=n/5,Tidak=0,NA*
Pernyataan Kahar dari Pejabat yang berwenang	
Surat penghentian pekerjaan selama masa keadaan kahar	
Surat permohonan penambahan waktu akibat penghentian sementara	
Addendum kontrak	
Apabila terjadi kontrak kritis, apakah dokumen administrasi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis telah dilengkapi dengan : *	
Surat Peringatan 1,2,3 dari PPK	Ada=n/4,Tidak=0,NA*
Berita Acara Show Cause Meeting (SCM)	
Berita Acara Rapat Pembuktian	
Surat Pernyataan Wanprestasi	
Apakah dokumen administrasi Pemutusan Kontrak telah dilengkapi dengan : *	
Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak	Ada=n/4,Tidak=0,NA*
Surat Pemutusan Kontrak	
Surat Pembayaran Prestasi Pekerjaan sesuai terlaksana	
Addendum terkait Pemutusan Kontrak	
Untuk melakukan pengukuran terhadap kelengkapan administrasi kontrak paket pekerjaan ini, mohon diberi tanda pada daftar simak dokumen berikut yang telah diarsipkan/dibukukan oleh Pengguna Jasa /PPK (ketersediaan dokumen disesuaikan dengan progres fisik yang terlaksana) :	
Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (<i>Pre Award Meeting</i>)	Ada=1,Tidak=0
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Ada=1,Tidak=0
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak	Ada=1,Tidak=0
Dokumen Kontrak (1 Bundel) yang terdiri dari :	Ada=n/total dok,Tidak=0
Adendum Kontrak (apabila ada);	

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
Surat Perjanjian;	
Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);	
Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);	
Surat Penawaran;	
Syarat-Syarat Khusus Kontrak;	
Syarat-Syarat Umum Kontrak;	
spesifikasi teknis; dan	
gambar-gambar.	
Surat Penugasan Pelaksana yang terdiri dari :	
SK Direksi Lapangan	Ada = 1
SK Direksi Teknis	
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja	Ada=1,Tidak=0
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Ada=1,Tidak=0
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (<i>Pre Construction Meeting</i>)	Ada=1,Tidak=0
Dokumen Pembayaran Uang Muka yang terdiri dari :	
Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (berikut Rencana Penggunaan Uang Muka);	Ada=n/5,Tidak=0,NA*
Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari PPK;	
Jaminan Uang Muka;	
Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);	
Berita Acara Pembayaran Uang Muka	
Dokumen Mobilisasi yang terdiri dari :	
Program Mobilisasi	Ada=n/4,Tidak=0
Daftar Peralatan	
Daftar Personil	
Jadwal Rencana Personil	
Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Bersama (<i>Mutual Check 0</i>)	Ada=1,Tidak=0
Laporan Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :	
Laporan Harian	Ada=n/3,Tidak=0
Laporan Mingguan	
Laporan Bulanan	
Dokumen Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang terdiri dari :	Ada=n/5,Tidak=0, NA

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
Surat Tagihan dari Penyedia;	
Laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk keperluan pembayaran (<i>Back Up Quantity & Quality</i> , sertifikat pembayaran);	
Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);	
Surat Pembayaran Prestasi Pekerjaan;	
Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan	
Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan yang terdiri dari :	
Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan selesai kpd PPK;	Ada=n/4,Tidak=0,NA*
Berita Acara PHO ;	
Bukti pembayaran 100%;	
As built drawing	
Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan yang terdiri dari :	
Surat-surat terkait pelaksanaan pemeliharaan;	Ada=n/5,Tidak=0,NA*
Jaminan Pemeliharaan;	
Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan dari penyedia;	
Berita Acara Masa Pemeliharaan Selesai dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;	
Berita Acara FHO	
TOTAL BOBOT INDIKATOR I :	18
JUMLAH NA :	
BOBOT MAKSIMAL INDIKATOR I :	18 - NA
NILAI :	
INDIKATOR KUNCI II : KESESUAIAN SUBSTANSI DOKUMEN	
Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (<i>Pre Award Meeting</i>)	n/5
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak	n/8
Surat Perjanjian;	n/4
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)	n/22
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (<i>Pre Construction Meeting</i>)	n/5
Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Bersama (<i>Mutual Check 0</i>)	n/3

DAFTAR SIMAK KONTRAK KONSTRUKSI	Ket.
TOTAL BOBOT INDIKATOR II :	6
NILAI :	
INDIKATOR KUNCI III : KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Sesuai = 1, Tidak = 0
Surat Perjanjian;	Sesuai = 1, Tidak = 0
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Sesuai = 1, Tidak = 0
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (<i>Pre Construction Meeting</i>)	Sesuai = 1, Tidak = 0
TOTAL BOBOT INDIKATOR III :	4
NILAI :	

3

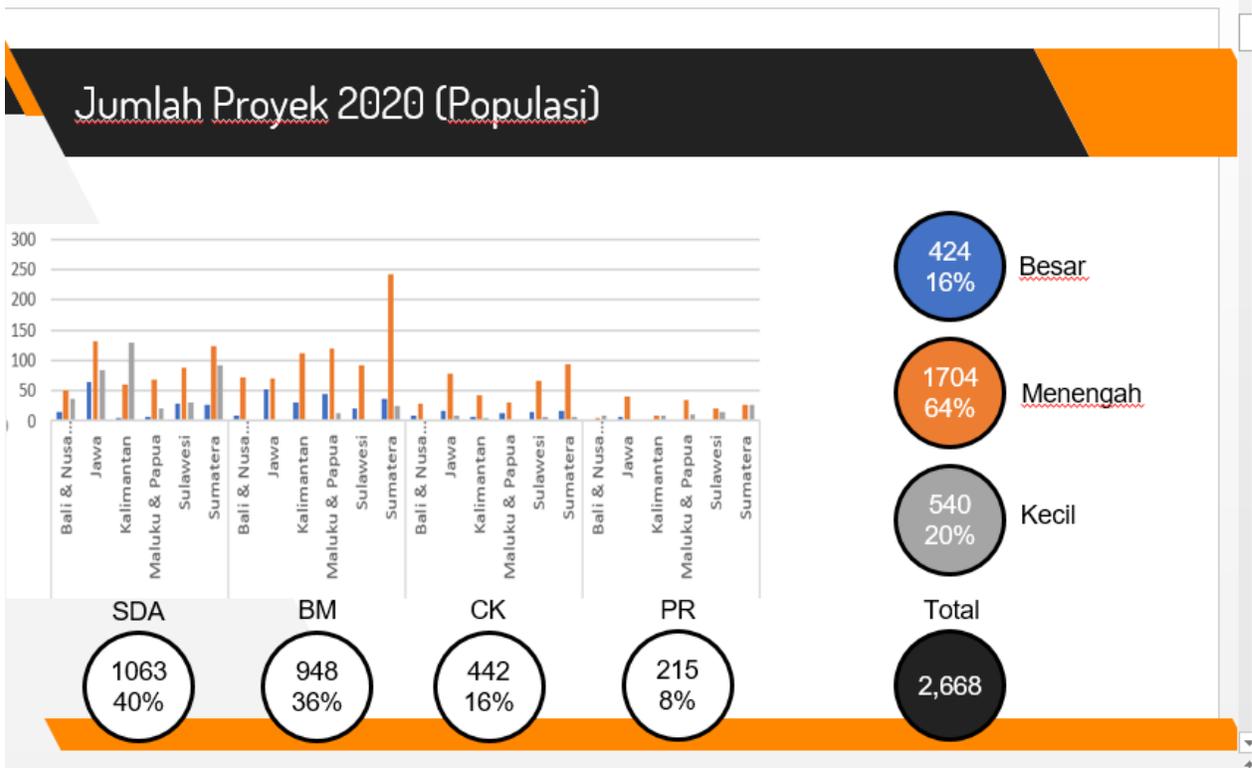
PROFIL PENERAPAN NSPK PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



Populasi dan Penentuang Sampling

Populasi pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah jumlah pekerjaan konstruksi Tahun 2020 di Kementerian PUPR sejumlah 2,668, dengan kategori 424 (16%) merupakan kualifikasi usaha besar, 1.704 (64%) merupakan kualifikasi usaha menengah, 540 (20%) merupakan kualifikasi usaha kecil.

Dengan pembagian unor, terlampir.



Jumlah Proyek 2020 (Populasi) - Lanjutan

Kategori	Besar	Menengah	Kecil	Total
ASDA	147	523	393	1063
Bali & Nusa Tenggara	15	51	37	103
Jawa	65	132	84	281
Kalimantan	5	61	130	196
Maluku & Papua	6	68	21	95
Sulawesi	29	88	30	147
Sumatera	27	123	91	241
BM	194	708	46	948
Bali & Nusa Tenggara	9	73	1	83
Jawa	53	70	2	125
Kalimantan	31	111	3	145
Maluku & Papua	44	120	13	177
Sulawesi	20	92	3	115
Sumatera	37	242	24	303

Kategori	Besar	Menengah	Kecil	Total
CK	73	340	29	442
Bali & Nusa Tenggara	8	29	3	40
Jawa	17	78	8	103
Kalimantan	6	42	4	52
Maluku & Papua	12	31	2	45
Sulawesi	14	67	6	87
Sumatera	16	93	6	115
PR	10	133	72	215
Bali & Nusa Tenggara		4	8	12
Jawa	6	40	3	49
Kalimantan	1	8	9	18
Maluku & Papua		34	11	45
Sulawesi	3	21	15	39
Sumatera		26	26	52

Teknik sampling yang digunakan dengan metode stratified random sampling dengan saringan bahwa semua pekerjaan konstruksi yang di sampling menggunakan Standard Dokumen Pemilihan menggunakan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 yang diterbitkan di bulan Mei 2020. Kenyataan di lapangan masih banyak pekerjaan konstruksi di TA 2020 yang menggunakan Permen PUPR No. 07 Tahun 2019. Pemantauan Evaluasi ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan menggunakan peraturan yang berlaku pada saat pemantauan dan evaluasi dilaksanakan.

Untuk paket pekerjaan konstruksi yang menggunakan Permen PUPR No. 07 tahun 2019 tidak diikuti sertakan, maka jumlah populasi yang sebelumnya 2.668 pekerjaan konstruksi, terseleksi dengan sendirinya sehingga populasi berubah menjadi 264 proyek pekerjaan konstruksi.

Target PE sebesar 264 proyek pekerjaan konstruksi, kemudian dihitung dengan sampling menggunakan rumus terlampir dengan margin eror 10%, didapat hasil jumlah paket pekerjaan yang dapat mewakili populasi didapat sebanyak 67 paket pekerjaan konstruksi.

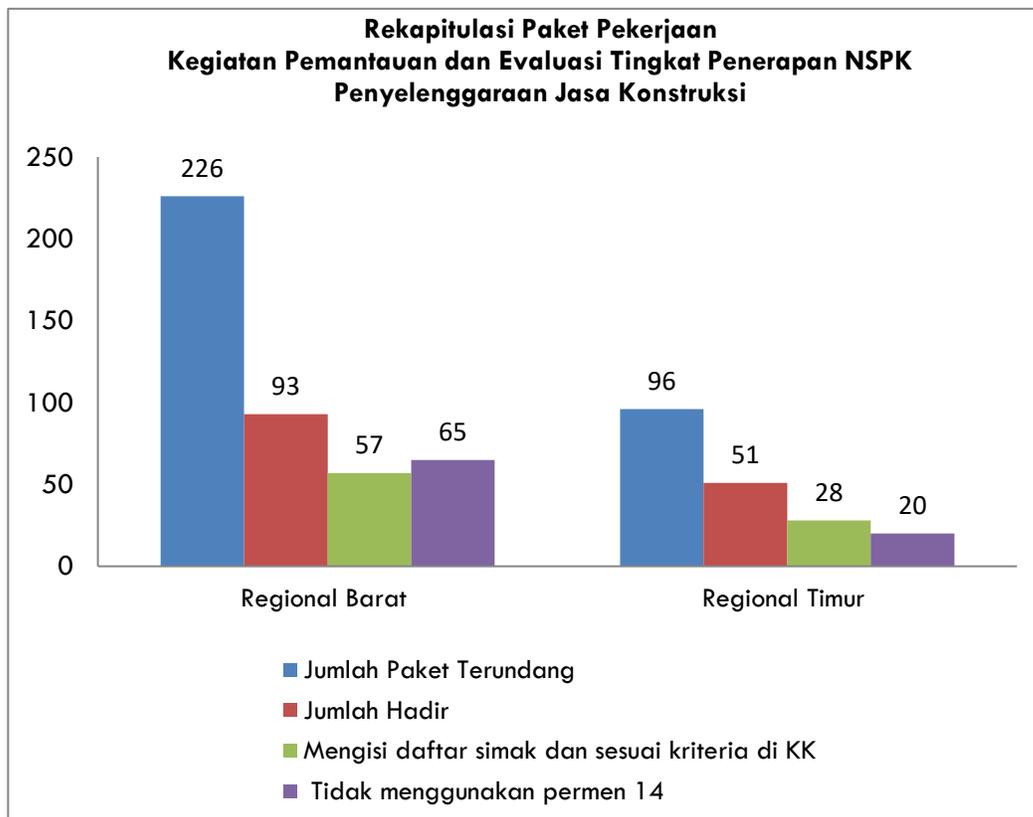
Rumus :

$$n = \frac{\sum_{i=1}^L N_i^2 \sigma_i^2 / w_i}{N^2 \frac{B^2}{z^2} + \sum_{i=1}^L N_i \sigma_i^2}$$

Profil Umum Penyelenggaraan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2020 terhadap paket pekerjaan konstruksi di Satuan Kerja masing-masing Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan dengan jadwal dapat dipetakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	Jumlah Paket Pekerjaan Terundang	Jumlah Hadir	Terkonfirmasi Tidak Menggunakan Permen 14/2020	Jumlah Paket Pekerjaan Mengisi Daftar SIMAK	Jumlah Paket Pekerjaan yang Sesuai Ketentuan
1	Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Regional Barat	Bintaro, 10 Desember 2020	226	133	65	87	57
2	Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Regional Barat	Bintaro, 11 Desember 2020	96	45	20	35	28
TOTAL			322	178	85	122	85



Dari rekapitulasi diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah paket pekerjaan yang hadir adalah 133 paket pekerjaan pada regional barat dan 45 paket pekerjaan pada regional timur. Dari hasil tersebut di atas, terdapat 85 Jumlah Paket Pekerjaan yang sesuai ketentuan, dari wilayah barat sebesar 57 paket, timur sebanyak 28 paket. Jumlah ini lebih besar dari jumlah minimal sampling yang dibutuhkan yaitu sebesar 67 paket. Penentuan pembagian regional barat dan timur, terdiri dari wilayah regional barat yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, sedangkan untuk pembagian regional timur yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua.

Rincian Hasil Perolehan Per Unit Organisasi

Berikut adalah rincian hasil perolehan per Unit Organisasi, untuk substansi Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

Dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebanyak 85 (delapan puluh lima) paket pekerjaan yang dinilai dikategorikan tertib secara menyeluruh dengan rata-rata nilai 85,19. Dengan hasil 5 (lima) paket pekerjaan dengan nilai tertinggi pada Tabel 3.2 dan 5 (lima) paket pekerjaan dengan nilai terendah pada Tabel 3.3.

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Unit Organisasi	Nilai	Status
1	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya)	Pembangunan Jembatan Ruas Elelim – Membramo (UMYC) / PN	Bina Marga	95,09	Tertib
2	Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur	Pembangunan Jembatan Paralel Perbatasan Ruas Tiong Ohang - Long Pahangai / Paralel Perbatasan II	Bina Marga	95,06	Tertib
3	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)	Preservasi Jalan Usilimo - Karubaga (MYC)	Bina Marga	94,85	Tertib
4	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Pembangunan Rumah Susun Ponpes La Tansa (PK-PRBTN-20-4)	Penyediaan Perumahan	94,67	Tertib
5	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta	Pembangunan Rumah Susun ASN BBWS Serayu Opak	Penyediaan Perumahan	94,28	Tertib

Tabel 3.1 Daftar 5 Paket Pekerjaan dengan Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Substansi Sistem Penyelenggaraan Terbaik

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Unit Organisasi	Nilai	Status
1	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Rumah Susun Universitas Mulawarman	Penyediaan Perumahan	65,63	Tertib
2	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020 5 (RSNJATIM 20-05)	Penyediaan Perumahan	66,21	Tertib
3	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali	Pembangunan JDU SPAM Regional Titab Bawah (IPA)	Cipta Karya	66,49	Tertib
4	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumatera Utara	Pembangunan Rumah Susun Ponpes Daarul Muhsinin Kab. Labuhan batu	Penyediaan Perumahan	66,91	Tertib
5	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali	Pembangunan Ipa Kapasitas 64 L/DT SPAM IKK Negara dan IKK Jembrana, Kabupaten Jembrana	Cipta Karya	67,68	Tertib

Tabel 3.2 Daftar Paket Pekerjaan dengan Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Substansi Sistem Penyelenggaraan Terendah.

Berikut adalah rincian hasil perolehan per Unit Organisasi, untuk substansi Kontrak Konstruksi sebagai berikut:

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
SDA	SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat	Pekerjaan Rehabilitasi Di Panti Rao di Kabupaten Pasaman	92.5	TERTIB
SDA	SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat	Pekerjaan Rehabilitasi Di Batang Tongar di Kab. Pasaman Barat	99.5	TERTIB
SDA	SNVT PJSA WS. Batanghari Provinsi Jambi	Pengaman Muara Sungai Batang Bungo Kabupaten Bungo	94.4	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
SDA	SNVT PJSA WS. Batanghari Provinsi Jambi	Revitalisasi Danau Sipin Kota Jambi (Lanjutan)	100	TERTIB
SDA	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU	Revitalisasi Situ Tebat Gelumpai Kabupaten Bengkulu Selatan	89.7	TERTIB
SDA	Satker BBWS Mesuji Sekampung	Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan Pelengkap Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	96.4	TERTIB
SDA	Satker BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Rehabilitasi Gedung Kantor BBWSC3 (Tahap III)	94.4	TERTIB
SDA	SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciberang Kec. Lebak Gedong	100	TERTIB
SDA	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak	Penyempurnaan Embung Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	94.4	TERTIB
SDA	SNVT PJPA WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan	Rehabilitasi D.I.R. Tamban Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP)	81.9	TERTIB
SDA	SNVT PJPA Citanduy	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manganti (S.I. Sidareja) IPDMIP	84.3	TERTIB
SDA	SNVT PJPA Sulawesi I Prov. Sulawesi Utara	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Likupang Tahap 1 (KSPN Manado - Likupang)	89.3	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
SDA	SNVT P.JSA Sulawesi II Gorontalo	Pengendalian Banjir Sungai Randangan	87.9	TERTIB
SDA	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala	97.8	TERTIB

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2020 ini diikuti oleh 14 paket pekerjaan. Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, seluruh paket pekerjaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang berpartisipasi tergolong Tertib. Nilai tertinggi yang diperoleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu pada paket pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciberang Kec. Lebak Gedong dan Revitalisasi Danau Sipin Kota Jambi (Lanjutan) dengan memperoleh nilai 100.

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
BM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Nilo	91.9	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
BM	Satker PJJN 1 Kepri	Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	92.3	TERTIB
BM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pematang Raman	99.5	TERTIB
BM	PJJN Wilayah I Provinsi Jambi	Rehabilitasi Jembatan Batanghari I	88.9	TERTIB
BM	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi	Duplikasi Jembatan Sarolangun/Btg. Tem	97.2	TERTIB
BM	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi	Pembangunan Jembatan Gantung Muara Lati	97.9	TERTIB
BM	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi	Pembangunan Jembatan Gantung Aur Cino	96.7	TERTIB
BM	SATKER PJJN WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN GEGASAN	95.6	TERTIB
BM	PJJN Wilayah III Provinsi Sumsel	Pembangunan Jembatan Gantung Provinsi Sumatera Selatan	82.6	TERTIB
BM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat	Paket Penggantian Jembatan Cipatujah	88.4	TERTIB
BM	PJJN 1 Jabar	Pembangunan Jembatan gantung Nawacita	69.2	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
BM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten	Pembangunan Jembatan Gantung Wilayah I Provinsi Banten (Jembatan Mekar Baru)	90.4	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Rehabilitasi Jalan Akses Pariwisata Ritual Makam Mbah Mangli dan Jalan Akses Tuk Budoyo	94.2	TERTIB
BM	Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jembatan Bts. Kec. Siding/Seluas - Bts. Kec. Sekayan/Entikong (MYC)	70.3	TERTIB
BM	Satker Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajok	Pembangunan Jembatan Ruas Nanga Era - Bts. Kaltim (MYC)	94.1	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur	Pembangunan Jembatan Paralel Perbatasan Ruas Tiong Ohang - Long Pahangai / Paralel Perbatasan II	98.6	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur	Pembangunan Jalan Tiong Ohang - Long Pahangai 3	91.7	TERTIB
BM	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan	Preservasi Jalan Pelabuhan Trisakti-Martapura-Bts. Kota Rantau	93.1	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
	Selatan			
BM	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Tengah	PAKET REHABILITASI JALAN BTS. KUNINGAN (PROV. JABAR)- WANASUKA	93.2	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur	PENANGANAN LONGSORAN DESA JEMBAYAN	85.6	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan	PENGGANTIAN JEMBATAN S.BATUNG II CS.	97.8	TERTIB
BM	Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau – Entikong – Aruk – Temajok Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jalan Temajuk - Aruk (MYC)	69.8	TERTIB
BM	Satker PJNW II Prov. NTB	Duplikasi Jembatan Pelempit	89.2	TERTIB
BM	Satker PJNW II Prov. Maluku	Pembangunan Jalan Bula-Masiwang-Air Nanang	70.5	TERTIB
BM	Satker PJNW I Prov. Papua (Jayapura)	Pembangunan Jalan Perbatasan Oksibil - Towe Hitam (MYC) / PN10	97.7	TERTIB
BM	Satker PJNW I Prov. Papua (Jayapura)	Pembangunan Jalan Ubrub - Towe Hitam - Oksibil (UMYC)	98.1	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Nama Satker	Paket Pekerjaan		
BM	Satker PJNW III Prov. Papua (Tanah Merah)	PENGASPALAN IWUR - WAROPKO	90.5	TERTIB
BM	Satker PJNW III Prov. Papua (Tanah Merah)	Pembangunan Jalan Akses PLBN Yetetkun	88.5	TERTIB
BM	Satker PJNW IV Prov. Papua (Jayawijaya)	PENGGANTIAN JEMBATAN BTS. KOTA WAMENA - PIRAMID - TIOM (MYC)	98.6	TERTIB
BM	Satker PJNW IV Prov. Papua (Jayawijaya)	PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS ELELIM – MEMBRAMO (UMYC) / PN	85.0	TERTIB
BM	Satker PJNW IV Prov. Papua (Jayawijaya)	Pembangunan Pagar Kantor	61.1	TERTIB
BM	Satker PJNW V Prov. Papua (Puncak Jaya)	PRESERVASI JALAN USILIMO - KARUBAGA (MYC)	61.1	TERTIB
BM	Satuan Kerja PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	Perbaikan Geometrik Jalan Akses Pelabuhan Petikemas Waekelambu (Jalan SP. Menjerite - Lancang)	90.74	TERTIB
BM	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan Jembatan Gantung (4 Unit)	92.30	TERTIB

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2020 ini diikuti oleh 34 paket pekerjaan. Pada Direktorat Bina Marga, seluruh Satker pada Direktorat Bina Marga yang

berpartisipasi tergolong Tertib. Nilai tertinggi yang diperoleh Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pematang Raman dengan nilai 99.5

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
CK	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Pasar Balerong Balige Kab. Toba Samosir	74.4	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Banten	Pembangunan GOR Tanara	86.1	TERTIB
CK	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Prov. Jawa Tengah	Revitalisasi Wisata Tuk Mulyo Desa Pandemulyo Kec. Bulu Kab. Temanggung	77.4	TERTIB
CK	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Prov. Jawa Tengah	Pembangunan TPA Kabupaten Banyumas	96.5	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Kalimantan Selatan	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin dan Hulu Sungai Selatan	91.9	TERTIB
CK	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi	Pembangunan IPA Kap. 2 x 30 L/detik dan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Way Sepagasan Kab.	97.8	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
	Lampung	Pringsewu		
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Prov. Jawa Tengah	Revitalisasi Wisata Religi Makam Makukuhan Desa Wonosari Kec. Bulu Kab. Temanggung	91.6	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Penataan Kawasan Gunung Kemukus Kabupaten Sragen	74.1	TERTIB
CK	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Banten	Pembangunan Landfill 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan	94.2	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Prov. Sulawesi Selatan	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar	92.1	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Prov. NTT	PEMBANGUNAN SPAM KALI DENDENG KAP 150 L/DETIK KOTA KUPANG	98.2	TERTIB
CK	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS PENDIDIKAN DASAR FASE IC	83.4	TERTIB
CK	Satker Pelaksanaan	Pembangunan JDU SPAM Regional Titab	99.7	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
	Prasarana Permukiman Wilayah Prov.Bali	Bawah (IPA)		
CK	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Prov.Bali	Pembangunan IPA Kapasitas 64 L/dt SPAM IKK Negara dan IKK Jembrana, Kabupaten Jembrana	99.5	TERTIB
CK	SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KSPN KAWASAN PANTAI MARINA - BUKIT PRAMUKA (ZONA 1 DAN 2) LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI	91.7	TERTIB
CK	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III NTT	Pembangunan Pengelolaan Sampah Proses Termal	92.2	TERTIB
CK	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Nusa Tenggara Timur	Penataan KSPN Fasilitas Penunjang Wisata Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat	89.3	TERTIB
CK	SATKER PPPW NTT WILAYAH III	PENATAAN KSPN KAWASAN PANTAI MARINA-BUKIT PRAMUKA ZONA 3-5	99.3	TERTIB
CK	Pelaksanaan Prasarana Permukiman III Provinsi Nusa Tenggara Timur	OPTIMALISASI JARINGAN SPAM KAWASAN LABUAN BAJO	88.9	TERTIB

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Cipta Karya pada tahun 2020 ini diikuti oleh 19 paket pekerjaan. Pada Direktorat Cipta Karya, seluruh Satker pada Direktorat Cipta Karya yang berpartisipasi tergolong Tertib. Nilai tertinggi yang diperoleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berasal dari paket pekerjaan Pembangunan JDU SPAM Regional Titab Bawah (IPA) dengan nilai 99.7

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumatera Utara	PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONPES DAARUL MUHSININ KAB. LABUHAN BATU	70.5	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Revitalisasi Rumah Susun IPB Bogor	78.0	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Susun Jawa Barat 4 (RSNPP-20-04-JBR)	87.4	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Pembangunan Rumah Susun Ponpes La Tansa (PK-PRBTN-20-4)	96.0	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Pembangunan Rumah Susun Ponpes An-Nawawi Tanara (PK-PRBTN-20-3)	92.6	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan Rumah Susun Ponpes Karang Santri dan Al Falah Lembah Manah (JTGPP20-05)	69.8	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020 5 (RSNJATIM 20- 05)	88.6	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020 4 (RSNJATIM 20- 04)	85.1	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta	Pembangunan Rumah Susun Asrama Mahasiswa PIAT UGM	81.8	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta	Pembangunan Rumah Susun ASN BBWS Serayu Opak	72.4	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara	Revitalisasi Rusun TNI AL Tarakan	77.1	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Khusus Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor I	89.6	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Khusus Relokasi Bencana Kabupaten Kuningan I (RSSJBR-20-01)	91.9	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Institut Teknologi Kalimantan (RSNITK 20-01)	68.0	TERTIB

DATA TERPILIH			NILAI TOTAL	PREDIKAT
Unor	Satker	Paket Pekerjaan		
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Rumah Susun Universitas Mulawarman	78.6	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali	Revitalisasi Rumah Susun ASN Provinsi Bali	92.4	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara	Pembangunan Talud Rusun IAIN Manado	94.2	TERTIB
PnP	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara	Revitalisasi Rumah Susun MBR Kota Kotomobagu	94.9	TERTIB

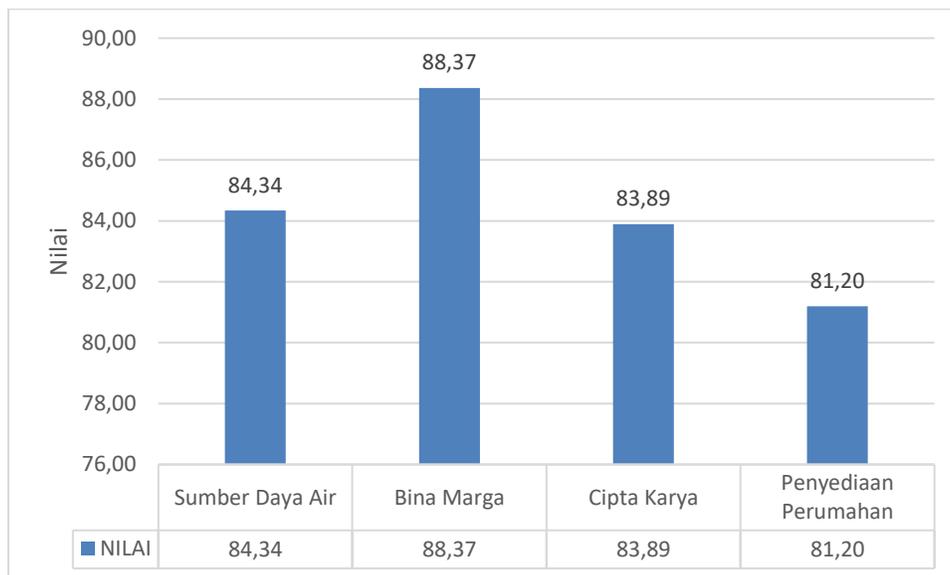
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun 2020 ini diikuti oleh 18 paket pekerjaan. Pada Direktorat Penyediaan Perumahan, seluruh Satker pada Direktorat Penyediaan Perumahan yang berpartisipasi tergolong Tertib. Nilai tertinggi yang diperoleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berasal dari Penyediaan Perumahan yaitu Pembangunan Rumah Susun Ponpes La Tansa (PK-PRBTN-20-4) dengan nilai 96.

Jadi, dari 85 paket pekerjaan yang menggunggah daftar simak, 100% dinyatakan tertib penyelenggaraan kontrak konstruksi.

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah dilaksanakan mencakup 4 (empat) Unor yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan, secara keseluruhan wilayah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Profil Kinerja Bidang PBJ Per Unit Organisasi

Secara menyeluruh, profil Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Per Unor dapat dikatakan baik dengan nilai tertinggi 88,37 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan nilai terendah 81,20 pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Adapun profil kinerja secara menyeluruh adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1 Profil Kinerja Bidang PBJ Per Unit Organisasi

3.1.1. Temuan Permasalahan

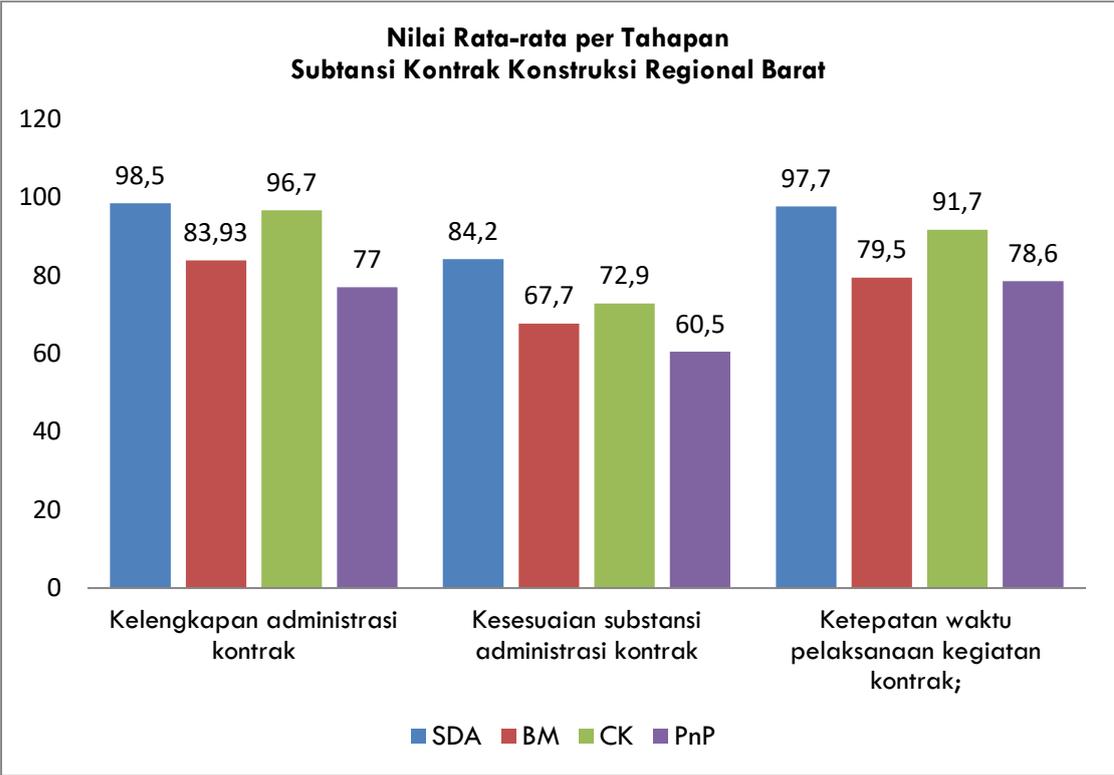
Terkait permasalahan yang terekam selama tahun 2020 didapatkan beberapa hal terutama, antara lain:

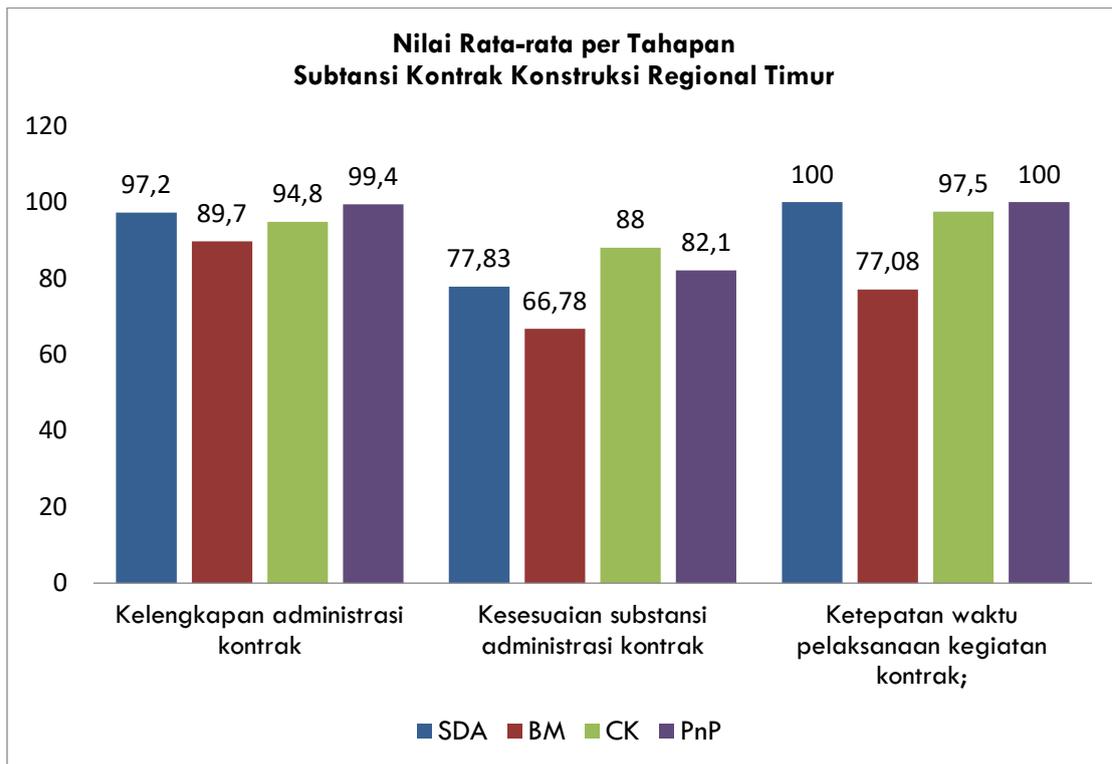
1. Walau sudah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020, namun masih ada beberapa paket pekerjaan yang belum menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020;
2. Pada tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan seringkali melewati tahapan penyusunan biaya pendukung;

3. Pada penetapan jenis jasa konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sering kali tidak memperhatikan komponen studi kelayakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain;
4. Pada penetapan jenis jasa konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sering kali tidak memperhatikan jika DED harus ada paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia;
5. Dokumen spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK sering tidak mencantumkan tata cara pengukuran dan pembayaran serta spesifikasi jabatan kerja ataupun komponen-komponen lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020, hal ini dikarenakan tidak adanya bentuk dokumen acuan terkait spesifikasi teknis yang baku;
6. Spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan sering kali tidak menjelaskan pekerjaan secara detail berbeda dengan dokumen spesifikasi teknis yang dibuat PPK;
7. Penyusunan RUP seringkali tidak dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya;
8. Rancangan kontrak pada Dokumen Pemilihan sering kali tidak diisi sesuai dengan detail paket pekerjaan;
9. Masih terdapat paket pekerjaan yang menyebutkan merk (ISO, OHSAS, dll) pada paket pekerjaan segmentasi besar;
10. Sering kali terjadi kesalahan pada jadwal pelaksanaan pemilihan, terutama terkait batas akhir pemasukan penawaran dan masa sanggah;
11. Meskipun tahun ini bukti kerja sudah diminimalisir menjadi 4 (empat) bukti kerja, namun masih banyak paket pekerjaan yang dimonitoring pada tahun anggaran ini tidak melakukan unggah bukti kerja atau mengunggah bukti kerja yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan nilai menjadi kecil dan terjadi interval nilai yang cukup besar antara paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan terendah; dan

12. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan terjadinya perubahan konsep dan jadwal kegiatan sehingga kegiatan baru dapat dilakukan pada bulan Desember. Hal ini berakibat kepada sulitnya untuk memastikan bahwa satuan kerja mengisi daftar simak, verifikasi daftar simak secara langsung dan melakukan pembinaan jika didapat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan NSPK substansi sistem penyelenggaran.

Secara menyeluruh, profil kontrak konstruksi, adapun profil kinerja secara menyeluruh adalah sebagai berikut:





1. Hasil tertinggi untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Barat :
 - Kelengkapan Dokumen Administrasi : SDA (98.5)
 - Kesesuaian Substansi Administrasi Kontrak : SDA (84.2)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak : SDA (97.7)
2. Hasil terendah untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Barat:
 - Kelengkapan Dokumen Administrasi : PnP (77)
 - Kesesuaian Substansi Administrasi Kontrak : PnP (60.5)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak : PnP (78.6)
3. Nilai rata-rata tertinggi untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Barat dalam tiga tahapan yaitu SDA.
4. Hasil tertinggi untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Timur :
 - Kelengkapan Dokumen Administrasi : PnP (99.4)
 - Kesesuaian Substansi Administrasi Kontrak : CK (88)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak : SDA dan PnP (100)

5. Hasil terendah untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Timur:
- o Kelengkapan Dokumen Administrasi : BM (89.7)
 - o Kesesuaian Substansi Administrasi Kontrak : BM (66.78)
 - o Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak : Bm (77.08)
6. Nilai rata-rata tertinggi untuk Review Daftar Simak per satminkal Regional Timur dalam tiga tahapan yaitu PnP.

Temuan

Indikator	Temuan
Pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak	Beberapa paket pekerjaan mengalami keadaan kahar, kontrak kritis dan sengketa
	Beberapa paket pekerjaan tidak memiliki Dokumen Mobilisasi, Berita acara Mutual Check 0, dan Laporan Hasil Pekerjaan yang lengkap
Pemenuhan kesesuaian substansi administrasi kontrak	Nomenklatur Dokumen kontrak (surat perjanjian, SSKK) masih belum sesuai dengan Permen 14/2020
	Hal-hal yang dibahas dalam berita acara PAM dan PCM belum sesuai dengan Permen 14/2020
	Berita acara Rapat PAM dan persiapan penandatanganan kontrak dibuat menjadi satu dokumen
Pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak	Ketepatan waktu pelaksanaan dalam SPPBJ, Surat Perjanjian, SPMK dan PCM masih belum sesuai dengan ketentuan Permen 14/2020

Hasil Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
1	Satker PJN Wil. III Prov. Papua (Tanah Merah)	Pengaspalan Jalan Iwur - Waropko	93,06	90,5	91,78
2	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)	Pembangunan Jalan Perbatasan Oksibil - Towe Hitam (MYC) /PN 010	92,46	97,7	95,08
3	SNVT PJSA SULAWESI I	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tikala	89,67	97,8	93,74
4	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)	Pembangunan Jalan Ubrub - Towe Hitam - Oksibil (UMYC)	93,55	98,1	95,83
5	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah)	Pembangunan Jalan Akses PLBN Yetetkun	81,62	88,5	85,06
6	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara	Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Likupang Tahap 1 (KSPN Manado-Likupang)	93,55	89,3	91,43
7	Satker PJNW II Prov. NTB	Duplikasi Jembatan Pelempit	88,42	89,2	88,81
8	SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT	PEMBANGUNAN SPAM KALI DENDENG KAPASITAS 150 L/DETIK KOTA KUPANG	79,91	98,2	89,06
9	SNVT PJSA Sulawesi II Gorontalo	Pengendalian Banjir Sungai Randangan	88,88	87,9	88,39
10	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali	Revitalisasi Rumah Susun ASN Provinsi Bali	89,74	92,4	91,07
11	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA)	PRESERVASI JALAN USILIMO - KARUBAGA (MYC)	94,85	61,1	77,98
12	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan UIN Alauddin Makassar	85,77	92,1	88,94
13	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan	PENGGANTIAN JEMBATAN BTS. KOTA	92,50	98,6	95,55

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
	Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya)	WAMENA - PIRAMID - TIOM (MYC)			
14	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali	Pembangunan JDU SPAM Regional Titab Bawah (IPA)	66,49	99,7	83,10
15	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara	Revitalisasi Rumah Susun MBR Kota Kotamobagu	85,33	94,9	90,12
16	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV. SULUT	Pembangunan Talud Rusun IAIN Manado	90,40	94,2	92,30
17	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku	Pembangunan Jalan Bula-Masiwang-Air Nanang	92,70	70,5	81,60
18	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali	PEMBANGUNAN IPA KAPASITAS 64 L/DT SPAM IKK NEGARA DAN IKK JEMBRANA. KABUPATEN JEMBRANA	67,68	99,5	83,59
19	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya)	Pembangunan Pagar Kantor	91,07	61,1	76,09
20	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS PENDIDIKAN DASAR FASE IC	70,00	83,4	76,70
21	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya)	PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS ELELIM – MEMBRAMO (UMYC) / PN	95,09	85	90,05
22	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi	Pembangunan Jembatan Gantung Muara Lati	92,49	97,9	95,20
23	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak	Penyempurnaan Embung Bansari. Kabupaten Temanggung. Jawa Tengah	85,64	94,4	90,02
24	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta	Pembangunan Rumah Susun ASN BBWS Serayu Opak	94,28	72,4	83,34
25	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR	Revitalisasi Situ Tebat Gelumpai Kabupaten Bengkulu Selatan	70,38	89,7	80,04

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
	SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU				
26	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II provinsi jambi	Jembatan Gantung Desa Aur Cino	87,38	96,7	92,04
27	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Banten	Pembanguna Gor Tanara	91,28	86,1	88,69
28	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Pembangunan Rumah Susun Ponpes An-Nawawi Tanara (PK-PRBTN-20-3)	93,80	92,6	93,20
29	PJN Wilayah 1 Provinsi Jambi	Rehabilitasi Jembatan Batanghari I	85,76	88,9	87,33
30	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citanduy	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manganti (S.I. Sidareja) IPDMIP	92,25	84,3	88,28
31	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta	Pembangunan Rumah Susun Asrama Mahasiswa PIAT UGM	88,20	81,8	85,00
32	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Rehabilitasi Jalan Akses Pariwisata Ritual Makam Mbah Mangli dan Jalan Akses Tuk Budoyo	85,98	94,2	90,09
33	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020 4 (RSNJATIM 20-04)	69,08	85,1	77,09
34	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pematang Raman	85,48	99,5	92,49
35	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumatera Utara	PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONPES DAARUL MUHSININ KAB. LABUHAN BATU	66,91	70,5	68,71
36	Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jembatan Bts. Kec. Siding/Seluas - Bts. Kec. Sekayan/Entikong (MYC)	86,21	70,3	78,26
37	Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Aruk - Temajuk Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jembatan Ruas Nanga Era - Bts. Kaltim (MYC)	92,53	94,1	93,32
38	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi	Duplikasi Jembatan Sarolangun/Btg. Tem	91,77	97,2	94,49



No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
39	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Nilo	92,75	91,9	92,33
40	SNVT. Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Batanghari Prov. Jambi	Pengaman Muara Sungai Batang Bungo Kabupaten Bungo	86,81	94,4	90,61
41	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur	Pembangunan Jalan Tiong Ohang - Long Pahangai 3	94,28	91,7	92,99
42	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara	Revitalisasi Rusun TNI AL Tarakan	84,25	77,1	80,68
43	Satker BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Rehabilitasi Gedung Kantor BBWSC3 Kota Serang (Tahap III)	75,16	94,4	84,78
44	PJN 1 Jawa Barat/ PJN IV Jawa Barat	Pembangunan Jembatan Gantung Nawacita PJN 1	91,69	69,2	80,45
45	Satker PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat	Pekerjaan Rehabilitasi DI Batang Tongar di Kab. Pasaman Barat	87,33	99,5	93,42
46	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur	Pembangunan Jembatan Paralel Perbatasan Ruas Tiong Ohang - Long Pahangai / Paralel Perbatasan II	95,06	98,6	96,83
47	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten	Pembangunan Jembatan Gantung Wilayah I Provinsi Banten (Jembatan Mekar Baru)	86,81	90,4	88,61
48	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Penataan Kawasan Gunung Kemukus Kabupaten Sragen	81,78	74,1	77,94
49	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Revitalisasi Rumah Susun IPB Bogor	82,91	78	80,46
50	SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU	PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN GEGASAN	70,35	95,6	82,98
51	Satker PJN 1 Kepri	Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	89,11	92,3	90,71
52	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciberang Kec. Lebak Gedong	75,48	100	87,74



No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
53	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Khusus Relokasi Bencana Kabupaten Kuningan I (RSSJBR-20-01)	80,45	91,9	86,18
54	SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. JAWA TENGAH	Paket Rehabilitasi Jalan BTS. KUNINGAN (PROV. JABAR)-WANASUKA	91,03	93,2	92,12
55	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten	Pembangunan Rumah Susun Ponpes La Tansa (PK-PRBTN-20-4)	94,67	96	95,34
56	Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Jawa Barat	Paket Penggantian Jembatan Cipatujah	74,97	88,4	81,69
57	Satuan Kerja BBWS Mesuji Sekampung	Rehabilitasi / Renovasi Gedung dan Bangunan Pelengkap Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	76,43	96,4	86,42
58	SNVT PJPA WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan	Rehabilitasi D.I.R. Tamban Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP)	86,30	81,9	84,10
59	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur	Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020 5 (RSNJATIM 20-05)	66,21	88,6	77,41
60	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Prov. Jawa Tengah	Revitalisasi Wisata Religi Makam Makukuhan Desa Wonosari Kec. Bulu Kab. Temanggung	89,58	91,6	90,59
61	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Susun Jawa Barat 4 (RSNPP-20-04-JBR)	78,91	87,4	83,16
62	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Khusus Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor I	79,23	89,6	84,42
63	SNVT PJSA WS. Batanghari Provinsi Jambi	Revitalisasi Danau Sipin Kota Jambi (Lanjutan)	87,40	100	93,70
64	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan Rumah Susun Ponpes Karang Santri dan Al Falah Lembah Manah (JTGPP20-05)	71,38	69,8	70,59
65	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung	Pembangunan IPA Kap. 2 x 30 L/detik dan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Way Sepagasan Kab. Pringsewu	91,85	97,8	94,83
66	PJN Wil. III Prov. Sumsel	Pembangunan Jembatan Gantung Provinsi Sumsel	89,89	82,6	86,25
67	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana	Pembangunan TPA Kabupaten Banyumas	74,32	96,5	85,41



No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
	Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah				
68	SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH III PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PENATAAN KSPN KAWASAN PANTAI MARINA - BUKIT PRAMUKA (ZONA 1 DAN 2) LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT	92,39	91,7	92,05
69	Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Prov Sumatera Utara	Pembangunan Pasar Balerong Balige Kab. Toba Samosir	87,28	74,4	80,84
70	Pelaksanaan Prasarana Permuikman Wilayah III Nusa Tenggara Tlmur	Penataan KSPN Fasilitas Penunjang Wisata Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat	89,60	89,3	89,45
71	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Selatan	Preservasi Jalan Pelabuhan Trisakti - Martapura - Bts. Kota Rantau	88,62	93,1	90,86
72	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III NTT	Pembangunan Pengelolaan Sampah Proses Termal	87,54	92,2	89,87
73	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Banten	Pembangunan Landfill 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan	81,47	94,2	87,84
74	SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumatera Barat	Pekerjaan Rehabilitasi DI Panti Rao di Kab. Pasaman	85,52	92,5	89,01
75	Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Nusa Tenggara Timur	OPTIMALISASI JARINGAN SPAM KAWASAN LABUAN BAJO	86,90	88,9	87,90
76	SATKER PPPW NTT WILAYAH III	PENATAAN KSPN KAWASAN PANTAI MARINA-BUKIT PRAMUKA ZONA 3-5	93,09	99,3	96,20
77	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI NTT	Perbaikan Geometrik Jalan Akses Pelabuhan Petikemas Waekelambu (Jalan SP. Menjerite - Lancang)	91,84	90,74	91,29
78	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH	FPBL.2020-06 REVITALISASI WISATA TUK MULYO DESA PANDEMULYO KEC. BULU KAB. TEMANGGUNG	86,03	77,4	81,715

No.	Nama Satker	Paket Pekerjaan	Nilai SPJK	Nilai KK	Nilai Akhir
79	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA SEKOLAH KABUPATEN TANAH BUMBU, KOTABARU, TAPIN DAN HULU SUNGAI SELATAN	91,02	91,9	91,46
80	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Institut Teknologi Kalimantan (RSNITK 20-01)	80,24	68	74,12
81	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur	PENANGANAN LONGSORAN DESA JEMBAYAN	81,84	85,6	83,72
82	SATKER PJN WILAYAH II KALSEL	PENGGANTIAN JEMBATAN S.BATUNG II CS.	81,6	97,8	89,7
83	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Rumah Susun Universitas Mulawarman	65,63	78,3	71,965
84	Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau – Entikong – Aruk – Temajok Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jalan Temajok - Aruk (MYC)	80,86	69,8	75,33
	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan	Pembangunan Jembatan Gantung (4 Unit)	80,86	92,30	86,58
Rata-rata			85,19	88,60870588	86,90

Dari hasil perhitungan penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi tahun 2020 dari substansi pengadaan jasa konstruksi dan kontrak konstruksi di dapat hasil dengan nilai akhir 86,90% dari target sebesar 60% pada tahun 2020.



HASIL PENDAMPINGAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kesimpulan dan Saran

Rencana Tindaklanjut

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dari berbagai macam temuan terkait daftar simak, dirumuskan usulan solusi dan tindak lanjut untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Beberapa rencana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unit Organisasi Teknis dapat membuat standar spesifikasi teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020, hal ini dikarenakan banyaknya temuan tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi teknis;
2. Diperlukan pembinaan lebih lanjut kepada personel UKPBJ terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020, hal ini karena ditemukannya beberapa hal, yaitu:
 - a. Masih banyak rancangan kontrak yang tidak diisi terkait detail paket pekerjaan pada dokumen pemilihan;
 - b. Seringkali spesifikasi teknis yang terdapat pada dokumen pemilihan berbeda dengan yang disusun oleh PPK; dan
 - c. Masih ada paket pekerjaan yang mensyaratkan merk pada sertifikat yang diminta seperti ISO, OHSAS dll.

No	Tahapan Kontrak	Solusi dan Tindak Lanjut	
1	Perencanaan	Perlunya diterbitkan dan sosialisasi jutilak terkait semua dokumen pada tahapan persiapan kontrak	Memberikan pendampingan terhadap satker yang dinilai belum tertib, dengan melihat hasil penilaian dari daftar simak yang telah diunggah.
2	Pelaksanaan Konstruksi	Perlunya menerapkan tertib administrasi pelaksanaan kontrak pada tim direksi lapangan minimal membuat dokumen tertulis dan foto sebagai kelengkapan dokumen kegiatan	
		Menyusun & sosialisasi Pedoman Pengendalian	

No	Tahapan Kontrak	Solusi dan Tindak Lanjut
		Pelaksanaan Administrasi Kontrak Melakukan Pelatihan Administrasi Kontrak Konstruksi Berbasis
3	Penerimaan Hasil Pekerjaan	Perlunya menerapkan tertib administrasi penyelesaian kontrak pada tim direksi lapangan minimal membuat dokumen tertulis dan foto sebagai kelengkapan dokumen kegiatan

